

Informasi bulanan

Maret 2024

**solvetax**

solutions for your tax

**Konsultasi pajak SolveTax  
StB Dipl.-Bw.(FH) Sascha Schneider**

Schwindstrasse 2  
63739 Aschaffenburg

Telepon: +49 151 28960404

E-mail: mail@solvetax.de

www.solvetax.de

## Apa kabar?

Pengadilan Fiskal Federal memutuskan bahwa penamaan tempat kerja dalam kontrak kerja tidak dengan sendirinya menentukan penugasan permanen ke tempat usaha tetap pemberi kerja.

Dalam keputusan selanjutnya, Pengadilan Fiskal Federal harus memutuskan apakah biaya untuk rumah dinas merupakan biaya tambahan yang diperlukan dalam situasi tertentu dalam sengketa tersebut, terlepas dari besarnya biaya tersebut.

Pengadilan Fiskal Federal berpendapat bahwa tunjangan tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bagi penerimanya. Dalam kasus rekan bisnis, hal ini akan ditolak jika, misalnya, acara tersebut hanya berfungsi untuk mempertahankan dan mengintensifkan kontak dengan pelanggan.

Mulai tahun 2023, nomor identifikasi pajak harus diberikan untuk pengiriman sertifikat pajak upah secara elektronik. Surat terbaru dari Kementerian Keuangan Federal mengatur prosedur jika pemberi kerja tidak memiliki nomor identifikasi pajak karyawan.

Pengadilan Eropa menganggap kewajiban PPN atas peralatan bisnis yang disewakan sebagai properti bebas PPN tidak sesuai dengan Petunjuk PPN di bawah Undang-Undang PPN Jerman.

Apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau topik lainnya? Silakan hubungi kami. Kami akan dengan senang hati membantu Anda.

## Untuk pembayar pajak penghasilan

## Penugasan tempat kerja pertama manajer lokasi yang dipekerjakan

Seorang manajer lokasi bekerja untuk sebuah perusahaan terbatas publik. Antara lain, AG memiliki fasilitas perusahaan tetap di sebuah lokasi (cabang AG) yang hanya disebut sebagai "tempat kerja" dalam kontrak kerja penggugat. Dia memiliki mobil perusahaan - juga untuk penggunaan pribadi - yang dapat digunakannya, yang penggunaannya dianggap oleh pemberi kerja dalam laporan penggajian sebagai tunjangan non-tunai berdasarkan aturan 0,03%. Manajer konstruksi berargumen bahwa ia tidak memiliki tempat kerja utama di kantor pusat perusahaan. Perjanjian eksplisit tentang penugasan ke tempat usaha tetap belum dibuat. Sebaliknya, ia melakukan kegiatan eksternal dalam bentuk apa yang disebut penugasan bergantian. Kantor pajak percaya bahwa pemberi kerja telah menugaskan manajer lokasi sebagai tempat kerja utama.

Pengadilan Fiskal Federal memutuskan untuk memenangkan manajer lokasi. Penamaan tempat kerja dalam kontrak kerja tidak dengan sendirinya menentukan penugasan permanen ke tempat usaha tetap pemberi kerja. Oleh karena itu, gaji manajer konstruksi seharusnya dikurangi dengan jumlah yang dihasilkan dari penerapan aturan 0,03% dan biaya makan tambahan yang diklaim harus diakui sebagai biaya yang berhubungan dengan pendapatan. Tunjangan perjalanan tidak boleh diterapkan.

Penugasan diam-diam seorang manajer lokasi yang dipekerjakan ke fasilitas bisnis tetap pemberi kerja tidak semata-mata disebabkan oleh fakta bahwa manajer lokasi hanya perlu mengunjungi fasilitas bisnis tertentu sesekali untuk melaksanakan kegiatan profesionalnya (misalnya rapat), tetapi sebaliknya melakukan pekerjaannya terutama di luar fasilitas tetap. Hal yang sama berlaku jika pemberi kerja telah menerapkan aturan 0,03% dalam laporan penggajian untuk penggunaan pribadi mobil perusahaan yang disediakan untuk karyawan, menurut Pengadilan Fiskal Federal.

## Biaya akomodasi yang dapat dikurangkan untuk layanan kamar ganda di luar negeri

Pengadilan Fiskal Federal harus memutuskan apakah biaya untuk tempat tinggal resmi dalam situasi sengketa (wajib menempati tempat tinggal resmi di luar negeri yang disediakan oleh pemberi kerja bersama dengan pemotongan tunjangan tempat tinggal

resmi dari remunerasi) merupakan biaya tambahan yang diperlukan terlepas dari besarnya.

Dalam kasus tempat tinggal ganda di luar negeri, harus diperiksa berdasarkan kasus per kasus biaya akomodasi yang diperlukan. Berlawanan dengan pendapat administratif (surat dari Kementerian Keuangan Federal tertanggal 25.11.2020), Pengadilan Fiskal Federal memutuskan bahwa tidak ada batas tarif tetap untuk rumah kedua di luar negeri (sewa rata-rata untuk 60 meter persegi).

Dalam kasus tempat tinggal resmi yang ditetapkan berdasarkan undang-undang kepegawaian, biaya akomodasi di tempat kerja di luar negeri selalu dapat dikurangkan dalam jumlah yang sebenarnya sebagai biaya yang terkait dengan pendapatan dalam konteks rumah tangga ganda.

### Tidak ada pajak tarif tetap untuk manfaat dalam bentuk barang yang diberikan oleh lembaga kredit kepada pelanggan pribadi untuk tujuan layanan pelanggan umum

Sebuah lembaga kredit mengundang berbagai klien pribadi kaya yang dikelola oleh Dewan Manajemennya ke dua acara (perjalanan dengan kapal dengan mencicipi anggur dan turnamen golf). Tidak ada produk tertentu yang diiklankan pada acara-acara ini. Undangan tersebut juga tidak memuat referensi apa pun tentang investasi tertentu atau kemungkinan pertemuan penasihat. Semua nasabah pribadi yang diundang memiliki setidaknya satu tabungan dan/atau rekening giro di bank. Beberapa dari nasabah swasta ini juga telah berinvestasi dalam sekuritas yang sangat berbeda melalui bank. Sekitar 20% dari nasabah swasta telah menyediakan modal kepada bank dengan suku bunga tetap dan jangka waktu yang tetap. Sebagian kecil nasabah swasta yang diundang juga telah menerima pinjaman. Bank mengenakan biaya acara tersebut pada pajak tarif tetap menurut Bagian 37b EStG dan melaporkannya dalam pengembalian pajak penghasilan.

Namun, Pengadilan Fiskal Federal percaya bahwa manfaat dalam bentuk natura dari lembaga kredit kepada pelanggan pribadinya, yang berfungsi untuk **mempertahankan hubungan bisnis**, tidak mengarah pada pengenaan pajak sekaligus menurut Pasal 37b (1) EStG. Manfaat dalam bentuk natura yang disengketakan - tidak seperti pendapatan

investasi biasa dalam arti Bagian 20 EStG - tidak dihitung berdasarkan investasi modal individu, tetapi sebagai jumlah sekaligus dan oleh karena itu diberikan tanpa memandang investasi modal.

## Perpajakan dari tarif tetap harga energi dipertanyakan

Mulai September 2022, harga energi sekaligus (EPP) sebesar 300 euro dibayarkan sebagai kompensasi atas biaya energi yang tinggi. Para pekerja, pensiunan, dan wiraswasta mendapat manfaat dari pembayaran satu kali ini. Namun, pembayaran sekaligus ini dikenakan pajak penghasilan atau kantor pajak menganggapnya sebagai pajak.

Namun, karena ada juga pendapat yang bertentangan, sebuah gugatan sedang menunggu di Pengadilan Fiskal Münster dan Pengadilan Fiskal Mecklenburg-Western Pomerania mengenai legalitas pajak atas harga energi yang dibayarkan sekaligus.

Oleh karena itu, masih harus dilihat apakah Pengadilan Fiskal Federal atau Mahkamah Konstitusi Federal akan segera memeriksa kewajiban pajak atas pembayaran sekaligus ini.

Banding dapat diajukan terhadap ketetapan pajak penghasilan tahun 2022 untuk mempertahankan kemungkinan pembebasan pajak. Namun, tidak ada hak hukum untuk menanggukhan proses tersebut.

### Catatan

Sebagai contoh, karyawan dapat melihat apakah mereka telah menerima tunjangan harga energi dari pemberi kerja mereka dengan entri "huruf kapital E" pada laporan pajak upah untuk tahun 2022.

## Penjualan kavling kebun dapat dikenakan pajak sebagai transaksi penjualan pribadi

Para pembayar pajak memperoleh sebidang tanah dengan sebuah bangunan pertanian tua. Mereka tinggal di bangunan itu sendiri. Bangunan itu dikelilingi oleh sebidang tanah seluas hampir 4.000 meter persegi. Para wajib pajak menggunakannya sebagai taman.

Mereka kemudian membagi properti itu menjadi dua bagian. Mereka terus tinggal di rumah di salah satu bagian properti dan menjual bagian lain - yang belum dikembangkan - dari properti tersebut. Para wajib pajak mengklaim pembebasan pajak penghasilan atas keuntungan modal karena digunakan untuk keperluan tempat tinggal mereka sendiri.

Keuntungan dari penjualan properti umumnya dikenakan pajak sebagai **transaksi penjualan pribadi jika** pembelian dan penjualan properti terjadi dalam waktu sepuluh tahun. Pengecualian pajak hanya berlaku jika properti ditempati oleh wajib pajak. Dengan tidak adanya bangunan di atas sebidang tanah, tanah yang belum dikembangkan tidak dapat ditempati. Hal ini juga berlaku jika bagian dari properti yang sebelumnya digunakan sebagai taman dipisahkan dan kemudian dijual. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Fiskal Federal.

## Menentukan nomor identifikasi pajak karyawan untuk transmisi elektronik sertifikat pajak upah

Mulai periode penilaian tahun 2023, **nomor identifikasi pajak akan** diperlukan untuk pengiriman sertifikat pajak upah secara elektronik.

Surat terbaru dari Kementerian Keuangan Federal mengatur prosedur jika pemberi kerja tidak memiliki nomor identifikasi pajak karyawan.

Jika pemberi kerja telah menyerahkan laporan pajak penghasilan untuk karyawan untuk tahun 2022 dan pemberi kerja memastikan bahwa hubungan kerja berlanjut setelah akhir tahun 2022 dan karyawan belum memberikan nomor identitasnya meskipun telah diminta untuk melakukannya, kantor pajak yang kompeten akan memberikan nomor identitas karyawan atas permintaan tertulis secara informal dari pemberi kerja.

Terlepas dari hal ini, pemberi kerja pada umumnya dapat meminta alokasi atau pemberitahuan nomor identifikasi pajak karyawan dari kantor pajak yang relevan jika karyawan telah mengizinkannya.

Jika karyawan tidak memberikan nomor identifikasi pajak kepada pemberi kerja dan pemberi kerja tidak dapat memperolehnya dari kantor pajak, pemberi kerja harus secara teratur menghitung pajak upah sesuai dengan kelas pajak VI.

Hanya dalam kasus di mana karyawan tidak bertanggung jawab atas tidak adanya pemberitahuan nomor identifikasi pajak atau pemberi kerja tidak dapat mengambil nomor identifikasi pajak karena kesalahan teknis, pemberi kerja dapat menggunakan kelas pajak yang diharapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan selama maksimal tiga bulan kalender.

## Apa yang dimaksud dengan "Progressionsvorbehalt"?

Undang-Undang Pajak Penghasilan memuat istilah "ketentuan perkembangan". Istilah ini mencakup dua kelompok yang diterapkan ketentuan perkembangan.

1. tunjangan penggantian upah dan pendapatan domestik menurut (Pasal 32b (1) ayat 1 no. 1 EStG).
2. Pendapatan luar negeri.
  - penghasilan luar negeri **dengan kewajiban pajak sementara yang tidak terbatas** (Pasal 32b (1) ayat 1 no. 2 EStG).
  - penghasilan luar negeri bebas pajak berdasarkan perjanjian pajak berganda - P3B (Pasal 32b (1) ayat 1 no. 3 EStG).
  - penghasilan luar negeri bebas pajak **berdasarkan perjanjian antar pemerintah lainnya** (Pasal 32b (1) ayat 1 no. 4 EStG).
  - Penghasilan komuter lintas batas, pasangan orang asing Uni Eropa/EEA dan karyawan tertentu dengan kewajiban pajak terbatas (Pasal 32b (1) ayat 1 no. 5 EStG).

Prinsip kemampuan individu untuk membayar berlaku dalam hukum pajak. Prinsip ini dipatuhi dengan hanya memperhitungkan komponen yang dibebaskan dari pajak dalam perkembangannya. Oleh karena itu, komponen pendapatan yang dikecualikan hanya dipertimbangkan dalam tarif atau tarif pajak.

Sederhananya, contoh berikut ini menunjukkan efeknya:

Penghasilan kena pajak dari wajib pajak:	30.000 euro
dikurangi pendapatan bebas pajak yang termasuk di dalamnya:	-10.000 Euro
tetap dikenakan pajak:	<b>20.000 euro</b>
Tarif pajak menurut tabel dasar (9,8%)	1.960 Euro
Tarif pajak untuk 30.000 euro (15,7%)	(4.710 euro)
Pajak karena penerapan tarif progresi terhadap penghasilan kena pajak sebesar EUR 20.000	3.140 Euro
Pajak tambahan karena penerapan tingkat perkembangan	1.180 Euro

Berikut ini: Jika ketentuan perkembangan diterapkan pada penghasilan, tarif pajak dapat meningkat secara signifikan.

Jika ada pendapatan negatif yang tunduk pada ketentuan perkembangan, maka hal ini akan mengurangi tarif pajak. Oleh karena itu, kerugian dapat menyebabkan tarif pajak menjadi nol. Hal ini **tidak berlaku untuk** pendapatan negatif di mana terdapat larangan kompensasi kerugian.

## Untuk pembayar PPN

### Penyewaan lahan dengan fasilitas operasi

Pengadilan Eropa telah memutuskan bahwa, dalam kasus sewa bebas PPN atas harta tidak bergerak, Undang-Undang PPN Jerman tidak menganggap kewajiban PPN atas peralatan bisnis yang disewakan sebagai bagian dari sewa sesuai dengan Petunjuk PPN. Sebaliknya, pasal yang relevan dari Petunjuk PPN harus ditafsirkan sebagai makna bahwa peralatan bisnis juga dibebaskan dari PPN jika penyewaan peralatan bisnis merupakan layanan tambahan untuk layanan utama penyewaan tanah bebas PPN.

Pengadilan Fiskal Federal mengikuti pandangan ini dan dengan demikian mengubah hukum kasus sebelumnya. Jika penyewaan atau penyewaan peralatan operasi yang dipasang secara permanen merupakan layanan tambahan untuk penyewaan atau penyewaan bangunan yang bebas PPN sebagai layanan utama, maka penyewaan bersama peralatan operasi tersebut juga bebas PPN.

#### Catatan

Perubahan pendapat hukum BFH telah mengakibatkan perlunya tindakan.

Jika penyewaan bersama peralatan operasi sekarang bebas PPN, pajak masukan tidak dapat lagi dikurangkan dari layanan masukan yang berkaitan dengan peralatan operasi!

Masih harus dilihat bagaimana otoritas pajak dan legislator akan bereaksi terhadap hal ini.

### Biaya inspeksi = layanan kena pajak?

Menyusul keputusan Pengadilan Eropa (Aproa Parking), Kementerian Keuangan Federal menambahkan paragraf 16b baru ke bagian 1.3 dari Keputusan Permohonan PPN dalam sebuah surat tertanggal 15 Desember 2023.

Oleh karena itu, biaya inspeksi yang dibebankan oleh pengusaha yang dipercayakan untuk mengoperasikan tempat parkir pribadi dari pengguna tempat parkir atas



ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan umum penggunaan tempat parkir tersebut merupakan imbalan atas layanan kena pajak yang disediakan oleh penyedia layanan. Namun, untuk pembayaran yang diterima sebelum 15.12.2023, otoritas pajak tidak keberatan jika dianggap sebagai kompensasi asli untuk kerusakan.

Dapatkah kantor pajak mencabut otorisasi untuk memajaki sesuai dengan pembayaran yang diterima sesuai dengan § 20 UStG setelah audit eksternal mengungkapkan bahwa pengusaha telah menerbitkan faktur dengan laporan PPN yang belum dibayar oleh penerima faktur selama bertahun-tahun?

Menurut keputusan terbaru dari Pengadilan Fiskal Federal, "keringanan pajak" ini, yang bertentangan dengan sistem, didasarkan pada pemahaman sebelumnya tentang Undang-Undang PPN Jerman.

Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mencabut persetujuan perpajakan yang sebenarnya. Pengaturan yang tidak semestinya oleh orang-orang kena pajak yang terlibat dalam pertukaran jasa juga tidak diasumsikan. Menurut Pengadilan Fiskal Federal, mungkin ada implementasi yang salah dari penerapan Petunjuk Sistem PPN (Pasal 167 Petunjuk PPN) oleh Negara Anggota Jerman.

## Hukum acara

### Pemeriksaan pajak juga diizinkan setelah kematian pemilik bisnis

Gugatan tersebut diajukan oleh dua orang anak laki-laki yang masing-masing menjadi ahli waris bersama setelah almarhum ayah mereka. Sang ayah menjalankan sebuah perusahaan konstruksi sampai kematiannya. Bisnis tersebut tidak dilanjutkan oleh kedua putranya. Namun demikian, kantor pajak memerintahkan pemeriksaan pajak untuk beberapa tahun sebelumnya. Kedua anak laki-laki tersebut percaya bahwa pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan selama pemiliknya sendiri dapat memberikan informasi mengenai kegiatan usaha dan usaha tersebut masih ada.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk periode pajak yang telah lewat meskipun pemilik bisnis telah meninggal dan bisnis tidak dilanjutkan oleh ahli waris. Kewajiban

pajak dialihkan kepada ahli waris setelah kematian pemilik bisnis. Ini juga termasuk menoleransi pemeriksaan pajak. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Pajak Hessian.

## Manajemen mesin kasir PC tanpa kriteria alokasi tetap - estimasi yang sah

Jika catatan individu kemudian direorganisasi oleh program setelah total penerimaan akhir hari (penerimaan-Z) dibuat, sehingga kriteria alokasi (nomor catatan data) yang pernah ditetapkan secara kronologis dihapus, maka ada hak untuk membuat estimasi berdasarkan manajemen kas yang tidak tepat. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Pajak Lower Saxony.

### Hukum perdata

## Kontrak sewa guna usaha mobil ditandatangani tanpa kewajiban untuk membeli - konsumen tidak memiliki hak untuk menarik diri

Konsumen yang menandatangani kontrak leasing untuk kendaraan bermotor tanpa kewajiban untuk membeli tidak memiliki hak untuk membatalkan. Di sisi lain, konsumen yang telah menandatangani perjanjian kredit untuk membeli kendaraan tanpa mendapatkan informasi yang memadai tentang hak dan kewajibannya, dapat mengajukan



penarikan kembali kapan saja selama informasi yang diberikan tidak lengkap dan akurat, asalkan penarikan kembali dilakukan sebelum kontrak dilakukan sepenuhnya. Ini adalah keputusan Pengadilan Eropa, yang memperjelas hak-hak konsumen dalam leasing dan kredit kendaraan.

Dalam kasus kontrak leasing untuk kendaraan bermotor tanpa kewajiban untuk membeli, hukum Uni tidak menimbulkan hak penarikan bagi konsumen. Di sisi lain, dalam kasus penandatanganan perjanjian kredit dengan tujuan untuk membeli kendaraan, konsumen dapat menggunakan hak penarikan kapan saja tanpa melakukan penyalahgunaan hak selama dia belum menerima informasi yang lengkap dan akurat tentang hak dan kewajibannya dan kontrak belum sepenuhnya dilakukan, yaitu sebagai aturan sampai angsuran pembayaran terakhir jatuh tempo.

Beberapa konsumen telah mengklaim di Pengadilan Regional Ravensburg bahwa mereka telah secara efektif mencabut perjanjian sewa guna usaha atau pinjaman dengan bank-bank produsen mobil (BMW Bank, Volkswagen Bank dan Audi Bank). Kontrak-kontrak tersebut berkaitan dengan penyewaan kendaraan tanpa kewajiban pembelian atau pembiayaan mobil bekas. Pengadilan Regional kemudian merujuk masalah ini ke ECJ.

#### Jejak

Konten telah disusun dengan sangat hati-hati, tidak mengklaim sebagai sesuatu yang lengkap dan tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan saran dalam kasus-kasus individual.

## Tanggal pajak/jaminan sosial Maret/April 2024

Jenis pajak		Kedewasaan	
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		11.03.2024 <sup>1</sup>	10.04.2024 <sup>2</sup>
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		11.03.2024	Tidak berlaku
Pajak perusahaan, biaya tambahan solidaritas		11.03.2024	Tidak berlaku
Pajak pertambahan nilai		11.03.2024 <sup>3</sup>	10.04.2024 <sup>4</sup>
Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh:	Transfer bank <sup>5</sup>	14.03.2024	15.04.2024
	Periksa <sup>6</sup>	11.03.2024	10.04.2024
Asuransi sosial <sup>7</sup>		26.03.2024	26.04.2024
Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas		Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas yang harus dibayarkan harus dibayarkan ke kantor pajak terkait pada saat yang sama dengan distribusi laba kepada pemegang saham.	

<sup>1</sup> Selama sebulan terakhir.

<sup>2</sup> Untuk bulan terakhir, untuk pembayar triwulanan selama triwulan kalender terakhir.

<sup>3</sup> Untuk bulan sebelumnya, untuk bulan sebelumnya dalam kasus perpanjangan permanen.

<sup>4</sup> Untuk bulan terakhir, untuk bulan kedua dari belakang dalam hal perpanjangan permanen, dan untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan (tanpa perpanjangan permanen).

<sup>5</sup> SPT PPN dan SPT PPh masa depan umumnya harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya keterlambatan pembayaran yang akan dikenakan jika pembayaran terlambat hingga tiga hari. Transfer bank harus dilakukan tepat waktu sehingga tanggal nilai pada rekening kantor pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

<sup>6</sup> Ketika membayar dengan cek, harap diperhatikan bahwa pembayaran hanya dianggap telah dilakukan tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Otorisasi pendebitan langsung harus diterbitkan sebagai gantinya.

<sup>7</sup> luran jaminan sosial jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir pada bulan berjalan. Prosedur debit langsung disarankan untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu standar untuk mengirimkan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu pada tanggal 22.03.2024/24.04.2024, pukul 00.00 dalam setiap kasus). Keunikan regional mengenai tanggal jatuh tempo mungkin perlu dipertimbangkan. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh kontraktor eksternal, data upah dan gaji harus dikirim ke kontraktor sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku khususnya jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.